LAPORAN BULANAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

BULAN OKTOBER 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H. Nomor 52 Palu, Kode Pos 94231

Telp. (0451) 483385 | CICA 0811 4444 064

ptun-palu.go.id | ptun.palu@gmail.com

KATA PENGANTAR



Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk periode Oktober 2026 disusun sebagai catatan pelaksanaan tugas sekaligus bahan pertanggungjawaban berkala kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Data dalam laporan ini dihimpun dari bidang kepaniteraan dan kesekretariatan, kemudian diperiksa kembali agar uraian, tabel, dan lampiran menunjukkan keadaan satuan kerja pada akhir bulan laporan. Penyajian laporan tidak hanya memuat daftar kegiatan. Perubahan sumber daya manusia, kondisi sarana, perkembangan anggaran, keadaan perkara, layanan publik, serta hambatan yang masih memerlukan tindak lanjut dicatat dalam satu rangkaian yang utuh. Mulai laporan ini, capaian kinerja juga ditempatkan dalam bab tersendiri agar pimpinan dapat membedakan data kegiatan, hasil yang dicapai, dan pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah menyiapkan data serta dokumen pendukung. Apabila masih terdapat kekurangan, perbaikannya menjadi bagian dari penyempurnaan pelaporan pada bulan berikutnya.

Palu, 5 November 2026

Ditandantangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,

OKTOVA PRIMASARI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
IKHTISAR EKSEKUTIF **5**
BAB I **7**
PENDAHULUAN **7**
A. Latar Belakang 7
B. Dasar Penyusunan 7
C. Gambaran Umum Pengadilan 8
1. Sejarah Singkat 8
2. Wilayah Hukum 8
3. Riwayat Pimpinan 9
D. Maksud dan Tujuan 9
E. Ruang Lingkup dan Sistematika 10
BAB II **11**
A. Manajemen Kepaniteraan 11
1. Laporan Keadaan Perkara 11
2. Laporan Jenis Perkara 11
3. Upaya Hukum 13
4. Pelaksanaan SIPP 13
5. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan 13
6. Pelayanan Pos Bantuan Hukum 14
7. Tata Kelola Arsip Perkara 15
B. Manajemen Kesekretariatan 16
1. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 16
1.1 Struktur Organisasi 16
1.2 Sumber Daya Manusia 17
1.3 Promosi, Mutasi, dan Pensiun 20
1.4 Pengelolaan Database SIKEP 20
2. Umum dan Keuangan 22
2.1 Tata Kearsipan dan Perpustakaan 23
a. Pengelolaan Persuratan 23
b. Pengelolaan Perpustakaan 23
c. Sarana Kearsipan dan Perpustakaan 23
2.2 Pengelolaan Aset dan BMN 23
a. Tanah dan Gedung 23
b. Rumah Dinas 24
c. Kendaraan Dinas 25
d. Penetapan Status, Penghapusan, dan Alih Status BMN 26
2.3 Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA dan Penerimaan Negara 26

a. DIPA 005.01 26
b. DIPA 005.05 26
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 26
3. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan 27
3.1 Perencanaan dan Anggaran 27
3.2 Website, Hosting, dan Jaringan 27
3.3 Pemantauan Kegiatan PTIP 28
C. Hambatan dan Tindak Lanjut 28
BAB III 31
A. Prinsip dan Metode Pengukuran 31
B. Ringkasan Hasil Monitoring 31
C. Pemantauan Indikator Kinerja Utama Pengadian 33
D. Analisis dan Tindak Lanjut Kinerja 35
BAB IV 39
A. Kesimpulan 39
B. Rekomendasi 39
LAMPIRAN 40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama Oktober 2026 pada umumnya berjalan sesuai bidang kerja masing-masing. Dukungan kesekretariatan tetap berlangsung, pengelolaan perkara berjalan melalui SIPP versi 7.0.6, dan layanan jaringan dinilai memadai. Pada saat yang sama, beberapa kebutuhan sarana belum dapat dituntaskan, terutama perangkat kerja, fasilitas ruang pemeriksaan persiapan, serta penyelesaian penghapusan kendaraan yang rusak berat.

No.	Bidang/Indikator	Posisi Oktober 2026	Keterangan
1	Sumber daya manusia	43 orang	Posisi akhir Oktober 2026; seluruh data SIKEP berstatus lengkap.
2	Persuratan	69 surat masuk; 194 surat keluar	Rekapitulasi satu bulan.
3	Realisasi DIPA 005.01	84,34%	Rp14.477.072.792 dari pagu Rp17.165.912.000
4	Realisasi DIPA 005.05	87,67%	Rp 69.084.500 dari pagu Rp 78.802.000.
5	PNBP bulan Oktober	Rp 2.810.900	Sesuai laporan penerimaan dan penyetoran PNBP.
6	Perkara gugatan	6 masuk; 4 putus; sisa 24	Terdapat 3 perkara dicabut dan 1 dismissal pada periode yang sama.
7	Upaya hukum	- masuk; 2 putus; sisa bln ini 15	Banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
8	Rasio penanganan perkara SIPP	80,00%	SIPP versi 7.0.6; data SIPP Mahkamah Agung.
9	Permohonan Informasi	8	Terdapat permohonan informasi.
10	Pengaduan	Nihil	Tidak terdapat pengaduan
11	Jaringan dan layanan daring	Memadai	Astinet dan broadband sebagai koneksi utama; Starlink dan Indibiz sebagai cadangan.

Hasil pemantauan terhadap 13 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa 8 indikator memiliki

capaian di atas target tahunan, sedangkan 5 indikator masih berada di bawah target. Capaian yang memerlukan perhatian terutama berkaitan dengan penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara, IKPA DIPA 005.05, NKPA kedua DIPA, serta perkembangan Indikator Pengelolaan Aset.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pengendalian kinerja secara berkelanjutan. Pencapaian target perlu dipertahankan, sementara indikator yang belum mencapai target harus ditelaah berdasarkan karakteristik pengukuran, perkembangan pelaksanaan tugas, dan kelengkapan data pendukungnya. Hasil monitoring menjadi dasar bagi pimpinan dalam menentukan prioritas pembinaan, perbaikan tata kerja, serta tindak lanjut pada periode berikutnya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan berkala atau laporan bulanan merupakan salah satu instrumen pengendalian satuan kerja dalam tata kerja pengadilan yang sudah berjalan. Melalui laporan, pimpinan memperoleh gambaran mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada periode bulan laporan, keadaan sumber daya, hasil layanan, masalah yang muncul, dan tindak lanjut yang diperlukan. Data yang semula berada pada masing-masing unit dihimpun secara seksama agar dapat dibaca sebagai satu keadaan organisasi pada periode tertentu.

Laporan bulanan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu juga menjadi bahan penyampaian keadaan satuan kerja kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Oleh karena itu, isi laporan harus bersumber dari catatan resmi, menggunakan batas waktu data yang sama, dan dapat ditelusuri kembali kepada unit pemilik data maupun lampiran pendukungnya.

B. Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Kedudukan pelaporan dalam tata kerja pengadilan dapat dirujuk secara lebih khusus pada Pasal 426 huruf g, Pasal 427 huruf a, dan Pasal 428 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, yang menempatkan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan dalam fungsi kesekretariatan serta tugas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Kewajiban menyampaikan laporan tepat waktu dan laporan berkala dari ketua pengadilan tingkat pertama kepada ketua pengadilan tingkat banding diatur dalam Pasal 444 sampai dengan Pasal 447. Adapun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 digunakan sebagai pedoman bentuk naskah dan penyajiannya, bukan sebagai dasar tunggal mengenai substansi dalam penulisan laporan maupun periodisasi pelaporan.

C. Gambaran Umum Pengadilan

1. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili. Pengadilan ini diresmikan pada 29 Oktober 1998 bersama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menandai dimulainya kegiatan operasional pengadilan-pengadilan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan Kelas IA Tipe C yang berkedudukan di Kota Palu, dengan kantor di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H. Nomor 52, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Tugasnya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi Kota Palu serta 12 kabupaten berikut:

1. Kabupaten Banggai
2. Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kabupaten Banggai Laut
4. Kabupaten Buol

5. Kabupaten Donggala
6. Kabupaten Morowali
7. Kabupaten Morowali Utara
8. Kabupaten Parigi Moutong
9. Kabupaten Poso
10. Kabupaten Tojo Una-Una
11. Kabupaten Sigi
12. Kabupaten Tolitoli

3. Riwayat Pimpinan

Sejak beroperasi pada 1998 sampai dengan Oktober 2026, PTUN Palu telah dipimpin oleh 15 orang Ketua. Riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jacob Gerungan, S.H. (1998–1999)
2. Sutoyo, S.H. (1999–2001)
3. Sulistyo, S.H. (2001–2002)
4. Achmad Husein, S.H. (2005–2006)
5. Dilmar Tatawi, S.H. (2006–2007)
6. Kamer Togatorop, S.H., M.A.P. (2007–2010)
7. Nabari Sembiring, S.H. (2010–2011)
8. H. Asmoro Budi Santoso, S.H. (2011–2012)
9. H. Satibi Hidayat Umar, S.H. (2012–2016)
10. Fari Rustandi, S.H., M.H. (2016–2020)
11. Nur Akti, S.H. (2020–2022)
12. Susilowati Siahaan, S.H., M.H. (2022–2023)
13. Danan Priambada, S.H., M.H. (2023–2024)
14. Rosidah, S.H., M.H. (2024–2026)
15. Oktova Primasari, S.H. (2026–sekarang)

D. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan keadaan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama satu bulan yang telah dilalui, termasuk perkembangan kegiatan, keadaan sumber daya, hasil layanan, dan permasalahan yang masih memerlukan penanganan. Penyusunannya merupakan

bentuk pertanggungjawaban berkala Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku pengadilan tingkat banding.

Informasi dalam laporan digunakan sebagai bahan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan. Di tingkat satuan kerja, laporan juga berfungsi sebagai catatan manajerial untuk menilai hasil bulan berjalan, memeriksa konsistensi data antar bagiannya, dan menentukan pekerjaan yang perlu diselesaikan pada bulan berikutnya.

E. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup laporan mencakup kegiatan kesekretariatan dan kepaniteraan selama Oktober 2026. Data yang disajikan meliputi organisasi dan sumber daya manusia, administrasi persuratan, kearsipan, perpustakaan, BMN dan sarana prasarana, anggaran dan PNBP, perencanaan dan teknologi informasi, keadaan perkara, SIPP, pelayanan informasi dan pengaduan, Pos Bantuan Hukum, serta pengelolaan arsip perkara.

Sistematika laporan terdiri atas empat bab: Bab I Pendahuluan; Bab II Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi; Bab III Capaian Kinerja Bulanan; dan Bab IV Penutup. Dokumen pendukung yang menjadi sumber angka tertentu ditempatkan pada bagian lampiran.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dan bertugas memberikan dukungan teknis serta administrasi perkara. Kegiatan yang dilaporkan meliputi keadaan perkara, klasifikasi jenis perkara, upaya hukum, pelaksanaan SIPP, pelayanan informasi dan pengaduan, Pos Bantuan Hukum, serta pengelolaan arsip perkara. Angka pada bagian ini merupakan data pemilik proses di Kepaniteraan dan harus konsisten dengan SIPP serta register terkait.

1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode bulan Oktober 2026 sebagai berikut:

No.	Tahapan Perkara	Sisa Bln Lalu	Masuk	Putus	Sisa Bln ini	Cabut	Gugur	Perlawanan	Dismissal
1	Gugatan	22	6	4	24	3	–	–	1
2	Banding	5	-	2	3	–	–	–	–
3	Kasasi	10	-	-	10	–	–	–	–
4	Peninjauan Kembali	2	-	-	2	–	–	–	–
5	Eksekusi	–	6	–	6	–	–	–	–

Catatan: Pada baris Gugatan, angka 4 pada kolom Putus sudah mencakup 3 perkara yang dicabut dan 1 perkara yang selesai melalui dismissal. Sisa akhir Oktober adalah 24 perkara (22 sisa bulan lalu + 6 masuk − 4 selesai).

2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, periode Bulan Oktober 2026 sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Sisa Bln Lalu	Masuk	Dicabut	Dismissal	PLW Diterima	PLW Ditolak	Putus Cabut	putus Dikabulkan	putus Ditolak	Putus Tidak Diterima	Sisa Bln ini
1	Pertanahan	14	3	–	–	–	–	1	–	–	—	16

No.	Jenis Perkara	Sisa Bln Lalu	Masuk	Dicabut	Dismissal	PLW Diterima	PLW Ditolak	Putus Cabut	putus Dikabulkan	putus Ditolak	Putus Tidak Diterima	Sisa Bln ini
2	Kepegawaian	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
3	Perizinan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Lingkungan Hidup	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Badan Hukum/Partai Politik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
8	Kepala Daerah	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Proses Pemilihan Umum	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Penggantian Antarwaktu	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
11	Ketenagakerjaan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Keterbukaan Informasi Publik	-	1	–	–	–	–	–	–	-	–	1
13	Pengadaan Tanah	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Fiktif Positif	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Penyalahgunaan Wewenang	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.	Jenis Perkara	Sisa Bln Lalu	Masuk	Dicabut	Dismissal	PLW Diterima	PLW Ditolak	Putus Cabut	putus Dikabulkan	putus Ditolak	Putus Tidak Diterima	Sisa Bln ini
16	Tindakan Pemerintahan (Perma 2 Tahun 2019)	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
17	Lain-lain	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Total	**22**	**6**	**–**	**1**	**–**	**–**	**3**	**–**	–	–	**24**

3. Upaya Hukum

Laporan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Laporan Jumlah Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, periode Bulan Oktober 2026, yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

No.	Tahap Upaya Hukum	Sisa Bulan lalu	Masuk	Putus	Sisa Bulan ini
1	Banding	5	-	2	3
2	Kasasi	10	-	-	10
3	Peninjauan Kembali	2	-	-	2
	Total	**17**	**-**	**2**	**15**

Komposisi sisa upaya hukum pada akhir Oktober 2026 terdiri atas 3 perkara banding, 10 perkara kasasi, dan 2 perkara peninjauan kembali. Dengan demikian, perkara kasasi merupakan bagian terbesar dari sisa proses upaya hukum dan perlu tetap dipantau terutama pada kelengkapan pengiriman berkas serta tindak lanjut administrasinya.

4. Pelaksanaan SIPP

Pelaksanaan SIPP menjadi tanggung jawab bersama seluruh pejabat dan petugas yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Versi yang digunakan pada Oktober 2026 adalah SIPP 7.0.6. Berdasarkan data SIPP Mahkamah Agung, rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan tercatat 80,00 %. Nilai ini dicatat

sebagai rasio SIPP dan tidak serta-merta menggantikan indikator ketepatan waktu penyelesaian perkara dalam dokumen kinerja.

5. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pelayanan informasi berpedoman pada KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Petugas pelayanan informasi dan pengaduan telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 1053/KPTUN.W4-TUN2/SK.OT1/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sarana pendukung meliputi meja pelayanan, buku register, dan formulir permohonan.

Pengaduan internal badan peradilan ditangani melalui Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS). Kanal pengaduan pelayanan publik lainnya diperlakukan sesuai ketentuan yang mengatur masing-masing kanal. Selama Oktober 2026 terdapat 8 (delapan) permohonan informasi serta tidak terdapat pengaduan yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Register Permohonan Informasi

No.	Jumlah Permohonan	Jenis Informasi	Tindak Lanjut
1.	3	Perkara dan Putusan	Dikabulkan sepenuhnya
2	5	Lain-Lain	1 Permohonan ditolak sebagian

Register Pengaduan

No.	Sumber Pengaduan	Tanggal diterima	Subjek	No. Register
1.	N I H I L	-	-	-

6. Pelayanan Pos Bantuan Hukum

Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Perkumpulan Cahaya

Keadilan Celebes. Pemberi layanan adalah advokat atau sarjana hukum/syariah yang bertugas sesuai ketentuan kerja sama dan pedoman layanan hukum di pengadilan.

Penerima layanan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan memerlukan bantuan hukum dalam penanganan perkara pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Pelayanan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. Rincian penyerapan anggaran Posbakum ditempatkan pada lampiran laporan realisasi anggaran DIPA 005.05.

7. Tata Kelola Arsip Perkara

Arsip perkara aktif, yaitu berkas yang masih berada dalam tahap pemeriksaan, dikelola oleh Kepaniteraan Muda Perkara. Setelah perkara berkekuatan hukum tetap dan proses administrasinya selesai, berkas diserahkan kepada Kepaniteraan Muda Hukum untuk ditata sebagai arsip perkara inaktif di ruang arsip. Penyerahan berkas perlu disertai pencatatan agar riwayat penguasaan dan lokasi simpan dapat ditelusuri.

B. Manajemen Kesekretariatan

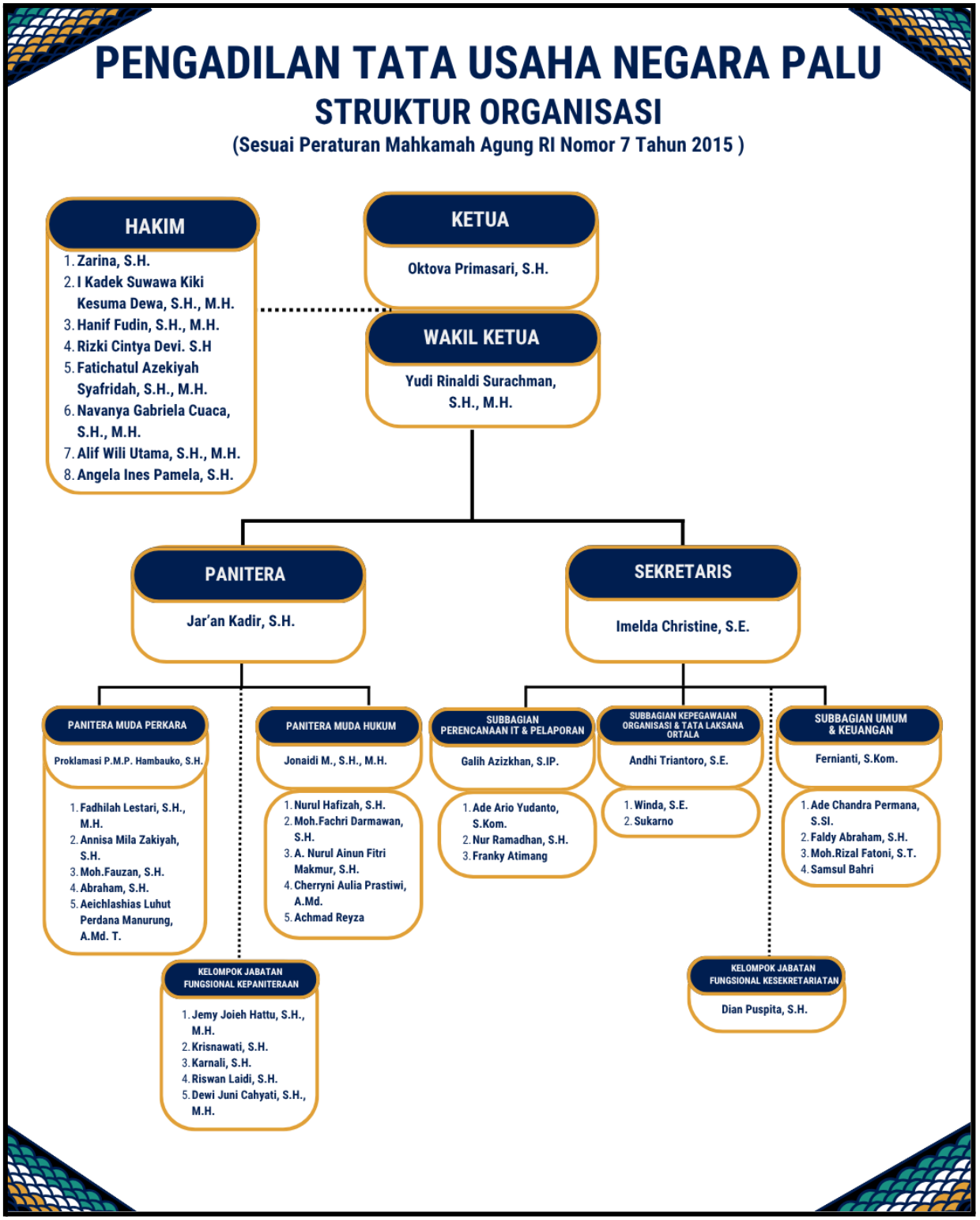
Kesekretariatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua serta dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, kesekretariatan memberikan dukungan administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan tugas tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dijalankan melalui Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; Subbagian Umum dan Keuangan; serta Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.

1. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyiapkan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana. Laporan bulan Oktober mencakup struktur organisasi, komposisi sumber daya manusia, perpindahan pegawai, pegawai yang memasuki masa pensiun, serta pemutakhiran data SIKEP.

1.1 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada periode laporan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Bagan berikut menunjukkan keadaan pejabat dan pelaksana pada periode laporan ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi PTUN Palu Oktober 2026

1.2 Sumber Daya Manusia

Pada akhir Oktober 2026, jumlah personel Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tercatat 43 orang. Komposisi tersebut terdiri atas pimpinan, hakim, pejabat

kepaniteraan dan kesekretariatan, pejabat fungsional, pelaksana, serta PPPK. Rincian nama, jabatan, dan golongan disajikan pada tabel berikut.

No	Jabatan	Nama	Gol
1.	Ketua	Oktova Primasari, S.H.	IV/c
2.	Wakil Ketua	Yudi Rinaldi Surachman, S.H., M.H.	IV/b
3.	Hakim	Zarina, S.H.	IV/b
4.	Hakim	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H.	III/b
5.	Hakim	Hanif Fudin, S.H., M.H.	III/b
6.	Hakim	Navanya Gabriela Cuaca, S.H., M.H.	III/b
7.	Hakim	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., M.H.	III/b
8.	Hakim	Alif Wili Utama, S.H., M.H.	III/b
9.	Hakim	Rizki Cintia Devi, S.H.	III/b
10.	Hakim	Angela Ines Pamela, S.H.	III/b
11.	Panitera	Jar'an Kadir, S.H.	IV/a
12.	Sekretaris	Imelda Christine, S.E.	IV/a
13.	Panitera Muda Hukum	Jonaidi M., S.H., M.H.	IV/a
14.	Panitera Muda Perkara	Proklamasi P.M.P Hambuako, S.H.	III/d
15.	Kasubbag Umum & Keuangan	Femianti, S.Kom.	III/d
16.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Andhi Triantoro, S.E.	III/b
17.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Galih Azizkhan, S.IP.	III/b
18.	Panitera Pengganti	Jemy Joieh Hattu, S.H., M.H.	III/d
19.	Panitera Pengganti	Krisnawati, S.H.	III/d
20.	Panitera Pengganti	Karnali, S.H.	III/c
21.	Panitera Pengganti	Riswan Laidi, S.H.	III/c

No	Jabatan	Nama	Gol
22.	Panitera Pengganti	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H.	III/b
23.	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Dian Puspita, S.H.	III/b
24.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Fadhillah Lestari, S.H., M.H.	III/c
25.	Pengelola Sistem & Teknologi Informasi	Ade Ario Yudanto, S.Kom.	III/a
26.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Nurul Hafiza, S.H.	III/a
27.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Annisa Mila Zakiya, S.H.	III/a
28.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	A. Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	III/a
29.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Abraham, S.H.	III/a
30.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Moh. Rizal Fatoni, S.T.	III/a
31.	Analis Dokumentasi Hukum	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md. T.	II/c
32.	Analis Dokumentasi Hukum	Cherryni Aulia Prastiwi, A.Md.	II/c
33.	Penata Layanan Operasional	Moh Fachri Darmawan, S.H.	IX
34.	Penata Layanan Operasional	Moh Fauzan, S.H.	IX
35.	Penata Layanan Operasional	Nur Ramadhan, S.H.	IX
36.	Penata Layanan Operasional	Winda, S.E.	IX
37.	Penata Layanan Operasional	Faldy Abraham, S.H.	IX
38.	Penata Layanan Operasional	Ulil Amri, S.E.	IX
39.	Penata Layanan Operasional	Ade Chandra Permana, S.Si.	IX

No	Jabatan	Nama	Gol
40.	Operator Layanan Operasional	Achmad Reyzha	V
41.	Operator Layanan Operasional	Franky Atimang	V
42.	Operator Layanan Operasional	Sukarno	V
43.	Operator Layanan Operasional	Samsul Bahri	V

Berdasarkan jabatan, komposisi tersebut meliputi Ketua 1 orang, Wakil Ketua 1 orang, Hakim 8 orang, Panitera 1 orang, Sekretaris 1 orang, Panitera Muda 2 orang, Kepala Subbagian definitif 3 orang, pejabat fungsional 1 orang, Panitera Pengganti 5 orang, pelaksana PNS 9 orang, dan PPPK 11 orang.

1.3 Promosi, Mutasi, dan Pensiun

Perubahan personel yang tercatat sampai dengan Oktober 2026 meliputi sebagaimana tabel berikut.

No	Jenis Perubahan	Nama	Asal Kondisi	Setelah Perubahan
1	Mutasi	-	-	-
2	Promosi	-	-	-
3	Pensiun	-	-	-

1.4 Pengelolaan Database SIKEP

Database SIKEP dikelola oleh Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Pemutakhiran dilakukan apabila terdapat perubahan pangkat, jabatan, penempatan, status kepegawaian, identitas, maupun dokumen pendukung lainnya. Pada akhir Oktober 2026, data 43 personel yang tercantum dalam rekapitulasi dinyatakan lengkap.

No	Nama	Status
1.	Oktova Primasari, S.H.	Lengkap

No	Nama	Status
2.	Yudi Rinaldi Surachman, S.H., M.H.	Lengkap
3.	Zarina, S.H.	Lengkap
4.	I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H.	Lengkap
5.	Hanif Fudin, S.H., M.H.	Lengkap
6.	Navanya Gabriela Cuaca, S.H., M.H.	Lengkap
7.	Fatichatul Azekiyah Syafridah, S.H., M.H.	Lengkap
8.	Alif Wili Utama, S.H., M.H.	Lengkap
9.	Rizki Cintia Devi, S.H.	Lengkap
10.	Angela Ines Pamela, S.H.	Lengkap
11.	Jar'an Kadir, S.H.	Lengkap
12.	Imelda Christine, S.E.	Lengkap
13.	Jonaidi Madri, S.H., M.H.	Lengkap
14.	Proklamasi P.M.P Hambuako, S.H.	Lengkap
15.	Femianti, S.Kom.	Lengkap
16.	Andhi Triantoro, S.E.	Lengkap
17.	Galih Azizkhan, S.IP.	Lengkap
18.	Krisnawati, S.H.	Lengkap
19.	Jemy Joieh Hattu, S.H., M.H.	Lengkap
20.	Karnali, S.H.	Lengkap
21.	Riswan Laidi, S.H.	Lengkap
22.	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H.	Lengkap
23.	Dian Puspita, S.H.	Lengkap
24.	Ade Ario Yudanto, S.Kom.	Lengkap

No	Nama	Status
25.	Fadhillah Lestari, S.H., M.H.	Lengkap
26.	Nurul Hafiza, S.H.	Lengkap
27.	Annisa Mila Zakiya, S.H.	Lengkap
28.	A. Nurul Ainun Fitri Makmur, S.H.	Lengkap
29.	Abraham, S.H.	Lengkap
30.	Moh. Rizal Fatoni, S.T.	Lengkap
31.	Aeichlashias Luhut Perdana Manurung, A.Md. T.	Lengkap
32.	Cherryni Aulia Prastiwi, A.Md.	Lengkap
33.	Moh Fachri Darmawan, S.H.	Lengkap
34.	Moh Fauzan, S.H.	Lengkap
35.	Nur Ramadhan, S.H.	Lengkap
36.	Winda, S.E.	Lengkap
37.	Faldy Abraham, S.H.	Lengkap
38.	Ulil Amri, S.E.	Lengkap
39.	Ade Chandra Permana, S.Si.	Lengkap
40.	Achmad Reyzha	Lengkap
41.	Franky Atimang	Lengkap
42.	Sukarno	Lengkap
43.	Samsul Bahri	Lengkap

2. Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan menangani persuratan, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan,

pengelolaan BMN, serta keuangan. Data bulan Oktober disajikan menurut kelompok pekerjaan agar angka operasional dan kondisi aset dapat diperiksa secara terpisah.

2.1 Tata Kearsipan dan Perpustakaan

a. Pengelolaan Persuratan

Pengelolaan surat kedinasan dilaksanakan melalui Subbagian Umum dan Keuangan sebagai pintu administrasi persuratan. Selama Oktober 2026 tercatat 69 surat masuk dan 194 surat keluar. Rincian menurut tujuan atau pejabat pengelola adalah sebagai berikut.

No	Klasifikasi Surat	Jumlah	
		Surat masuk	Surat keluar
1	Ketua / Wakil ketua	61	95
2	Panitera	-	34
3	Sekretaris	8	65
	Jumlah	**69**	**194**

b. Pengelolaan Perpustakaan

Sampai dengan akhir Oktober 2026, koleksi perpustakaan tercatat 909 eksemplar. Pencatatan koleksi dilakukan melalui buku register dan telah didukung oleh aplikasi SLiMS. Pemanfaatan aplikasi ini perlu diikuti dengan pemutakhiran data koleksi serta pencatatan peminjaman secara tertib.

c. Sarana Kearsipan dan Perpustakaan

Perpustakaan telah menempati ruang khusus dan memiliki lemari penyimpanan buku. Sarana kerja petugas serta meja baca dan kursi untuk pengunjung belum tersedia secara memadai. Keadaan tersebut masih perlu ditindaklanjuti agar fungsi perpustakaan dan penataan bahan pustaka dapat berjalan lebih baik.

2.2 Pengelolaan Aset dan BMN

a. Tanah dan Gedung

Tanah kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki luas 3.250 m², dengan luas gedung 2.281,63 m², dan beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H.

Nomor 52 Palu. Tanah rumah dinas memiliki luas 2.123 m² dan berada di Jalan Kijang Raya Nomor 47 Palu.

b. Rumah Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengelola delapan rumah dinas. Seluruh bangunan tercatat berkondisi rusak ringan. Data fisiknya disajikan sebagai berikut.

No.	Tipe	Tahun	Luas Tanah	Luas Bangunan	Kondisi
1	Gol.1 C Permanen	1996	265 m²	77 m²	Rusak Ringan
2	Gol.1 C Permanen	1996	265 m²	77 m²	Rusak Ringan
3	Gol.1 C Permanen	1996	265 m²	77 m²	Rusak Ringan
4	Gol.1 C Permanen	1996	265 m²	77 m²	Rusak Ringan
5	Gol.1 C Permanen	1996	265 m²	77 m²	Rusak Ringan
6	Gol.1 C Permanen	1996	265 m²	77 m²	Rusak Ringan
7	Gol.1 C Permanen	2003	265 m²	77 m²	Rusak Ringan
8	Gol.1 C Permanen	2003	265 m²	77 m²	Rusak Ringan

Peruntukan rumah dinas pada Oktober 2026 ditetapkan melalui keputusan penghunian sebagai berikut:

1. Rumah Nomor 47 A untuk Ketua berdasarkan Keputusan Nomor 66/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026;
2. Rumah Nomor 47 B untuk Wakil Ketua berdasarkan Keputusan Nomor 65/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026;
3. Rumah Nomor 47 E untuk Hakim Hanif Fudin, S.H., M.H. berdasarkan Keputusan Nomor 62/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026;
4. Rumah Nomor 47 F untuk Hakim I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa, S.H., M.H. berdasarkan Keputusan Nomor 61/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026;

5. Rumah Nomor 47 H untuk Hakim Alif Wili Utama, S.H., M.H. berdasarkan Keputusan Nomor 59/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026;
6. Rumah Nomor 47 C untuk Hakim Angela Ines Pamela, S.H. berdasarkan Keputusan Nomor 64/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026;
7. Rumah Nomor 47 G untuk Moh. Rizal Fatoni, S.T. berdasarkan Keputusan Nomor 60/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026; dan
8. Rumah Nomor 47 D untuk Panitera berdasarkan Keputusan Nomor 63/SEK.PTUN.W4-TUN2/PL1.2/I/2026.

c. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas terdiri atas kendaraan roda empat dan roda dua. Satu unit Toyota Innova G berkondisi baik dan digunakan oleh Ketua. Dua kendaraan roda empat serta tujuh kendaraan roda dua tercatat rusak berat dan sedang dalam proses penghapusan. Daftar kendaraan disajikan di bawah ini.

No	Tipe Kendaraan	Tahun	Status	Pengguna
1	Toyota Innova G	2025	Baik	Ketua
2	Toyota Vios	2007	Dalam Proses Lelang di KPKNL	-
3	Toyota KF 80 I	2001	Dalam Proses Lelang di KPKNL	-
4	Honda NF 125 D	2006	Dalam Proses Lelang di KPKNL	-
5	Honda Glp III (Mega pro)	2006	Dalam Proses Lelang di KPKNL	-
6	Honda Supra 125 SFC	2007	Dalam Proses Lelang di KPKNL	-
7	Honda Supra NF 125 TRF	2008	Dalam Proses Lelang di KPKNL	-
8	Honda Revo	2009	Dalam Proses Lelang di KPKNL	-
9	Honda Revo	2009	Dalam Proses Lelang di KPKNL	-
10	Honda Revo	2009	Dalam Proses Lelang di KPKNL	-

Kebutuhan kendaraan yang dicatat dalam laporan Oktober 2026 telah dilaksanakan pengusulan kebutuhan kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan roda empat untuk Ketua/Wakil Ketua, 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional roda empat, serta 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional roda dua. Pengusulan didukung dengan penyusunan TOR dan RAB sesuai kebutuhan operasional satuan kerja dan ketentuan yang berlaku.

d. Penetapan Status, Penghapusan, dan Alih Status BMN

Pada Oktober 2026 terdapat penetapan status penggunaan BMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11920/SEK/SK.PL1.2/VII/2026. Dalam periode yang sama tidak terdapat penghapusan BMN dan tidak terdapat pengalihan status BMN. Proses penghapusan kendaraan masih berjalan dan belum dicatat sebagai penghapusan yang telah selesai.

2.3 Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA dan Penerimaan Negara

a. DIPA 005.01

No	Belanja	DIPA (005.01)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bulan ini	
1	Pegawai (51)	15.357.293.000,	966.267.013,-	13.033.410.120,-	2.323.882.880,-
2	Barang(52)	1.734.619.000,-	137.384.289,-	1.369.880.972,-	364.738.028,-
3	Modal(53)	74.000.000,-	0,-	73.781.700,-	218.300,-

b. DIPA 005.05

No	Belanja	DIPA (005.05)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bulan ini	
1	Barang (52) Non Operasional	78.802.000,-	4.010.000,-	69.084.500,-	9.717.500,-

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Oktober 2026 berjumlah Rp 2.810.900,-. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan uang meja, ongkos perkara,

pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya, serta pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi.

No	Akun	Jenis Pendapatan	Bulan lalu	Bulan ini
1	425122	Pendapatan dari penjualan Peralatan dan mesin	0,-	0,-
2	423911	Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,-	0,-
3	423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	0,-	0,-
4	425232	Uang Meja (Leges)	160.000,-	150.000,-
5	425233	Ongkos Perkara	1.120.000,-	150.000,-
6	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.874.044,-	1.320.500,-
7	425151	Pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi	1.190.400,-	1.190.400,-
		Total	**4.344.444,-**	**2.810.900,-**

3. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan menyiapkan bahan program dan anggaran, mengelola teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan. Pada Oktober 2026, pelaksanaan tugas Subbagian PTIP didukung oleh Kepala Subbagian dan personel yang ditugaskan sesuai pembagian tugas.

3.1 Perencanaan dan Anggaran

Sampai dengan Oktober 2026, DIPA 005.01 telah mengalami revisi ke sebelas (11) dan DIPA 005.05 telah mengalami revisi keempat (4). Setiap perubahan perlu diikuti dengan penyesuaian dokumen kerja, pemantauan halaman III DIPA, serta pemeriksaan konsistensi antara pagu setelah revisi dan laporan realisasi anggaran.

3.2 Website, Hosting, dan Jaringan

Website dan akun hosting dikelola secara mandiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Koneksi internet utama menggunakan layanan Telkom Astinet

Dedicated 25 Mbps dan broadband 200 Mbps berdasarkan Kontrak Nomor K.TEL.1097/HK.810/DR7-1A200000/2024. Untuk menjaga keberlanjutan layanan, Starlink dan Telkom Indibiz tersedia sebagai koneksi cadangan. Sepanjang Oktober 2026, kondisi jaringan secara umum dinilai memadai.

3.3 Pemantauan Kegiatan PTIP

No.	Kegiatan	Hasil/Keadaan Oktober 2026	Catatan Pemantauan
1	Revisi DIPA/POK	DIPA 005.01 revisi ke-11; DIPA 005.05 revisi ke-4	Selesai dicatat; konsistensi dokumen perlu terus dipantau.
2	Website dan hosting	Dikelola oleh satuan kerja	Berjalan; pembaruan konten dan pencadangan perlu dilakukan berkala.
3	Koneksi utama	Astinet Dedicated 25 Mbps dan broadband 200 Mbps	Berjalan dan secara umum memadai.
4	Koneksi cadangan	Starlink dan Telkom Indibiz	Tersedia untuk menjaga keberlanjutan layanan.
5	Dukungan SIPP	SIPP versi 7.0.6; rasio penanganan perkara 80,00 %	Berjalan; angka kinerja perkara tetap diverifikasi Kepaniteraan.
6	Pelaporan bulanan	Kompilasi data Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Dilaksanakan dan disampaikan melalui surat pengantar.

C. Hambatan dan Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan tugas selama bulan Oktober 2026, masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pekerjaan, terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia pada bagian Kesekretariatan serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kerja.

No.	Hambatan	Dampak	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status
1.	Jumlah sumber daya manusia pada bagian Kesekretariatan belum sebanding dengan beban dan cakupan pekerjaan yang harus dilaksanakan.	Pembagian beban kerja belum optimal dan beberapa pekerjaan masih harus dilaksanakan secara rangkap oleh pegawai yang tersedia.	Melakukan penataan pembagian tugas dan prioritas pekerjaan, mengoptimalkan SDM yang tersedia, serta mengusulkan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai hasil analisis beban kerja.	Sekretaris dan masing-masing Subbagian	Berproses
2.	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja belum memadai, terutama kebutuhan mebel pada ruang sidang pemeriksaan persiapan serta printer pada beberapa unit kerja, baik dari segi jumlah maupun kondisi.	Pelaksanaan persidangan dan pekerjaan administrasi belum berjalan optimal.	Melakukan inventarisasi kebutuhan, menyusun skala prioritas, dan mengusulkan pengadaan atau penggantian sesuai ketersediaan anggaran.	Sekretaris melalui Subbagian Umum dan Keuangan	Berproses
3.	Beberapa sarana penunjang pelayanan dan pelaksanaan tugas lainnya masih memerlukan	Pelaksanaan pelayanan dan kegiatan administrasi pada beberapa bagian belum dapat	Melakukan pemetaan kebutuhan sarana secara bertahap dan memasukkannya dalam perencanaan	Umum dan Keuangan bersama unit terkait	Berproses

	pemenuhan dan peningkatan kondisi.	didukung secara optimal.	kebutuhan barang serta penganggaran berdasarkan tingkat prioritas.		

Secara umum, tindak lanjut terhadap hambatan tersebut diarahkan pada optimalisasi sumber daya yang tersedia dalam jangka pendek serta pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana secara bertahap melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

BAB III
CAPAIAN KINERJA BULANAN

A. Prinsip dan Metode Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada bulan Oktober 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta pencapaian sasaran kinerja satuan kerja. Pengukuran yang dilakukan tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pelaporan administratif, melainkan menjadi salah satu instrumen pengendalian yang memungkinkan pimpinan menilai hasil pelaksanaan tugas, mengenali hambatan, serta menentukan langkah perbaikan secara terukur dan berkelanjutan.

Pengukuran dilakukan terhadap 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mengacu pada target dalam Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026. Data realisasi dihimpun melalui Matriks Pengumpulan dan Verifikasi Data Kinerja Oktober 2026, berdasarkan sumber resmi dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh masing-masing unit pemilik indikator. Tingkat capaian dihitung melalui perbandingan antara nilai realisasi dan target tahunan, kemudian dinyatakan dalam persentase. Namun demikian, interpretasi hasil tetap memperhatikan karakteristik masing-masing indikator. Nilai yang menggambarkan kondisi bulanan, hasil survei triwulanan, posisi kumulatif, dan penilaian tahunan berjalan tidak diperlakukan sebagai ukuran yang identik.

B. Ringkasan Hasil Monitoring

Hasil pemantauan kinerja bulan Oktober 2026 menunjukkan bahwa seluruh 13 (tiga belas) indikator telah memiliki nilai realisasi. Sebanyak 8 indikator menunjukkan tingkat capaian di atas 100 persen terhadap target tahunan, sedangkan 5 indikator lainnya masih berada di bawah target. Dari keseluruhan indikator, 13 telah dilakukan kroscek silang dan validitas data dan terverifikasi. Dengan demikian, angka yang disajikan merupakan posisi hasil penghimpunan data Oktober 2026 yang tetap memerlukan penyelesaian verifikasi sebelum ditetapkan sebagai hasil monitoring final.

No.	Kelompok Kinerja	Jumlah IKU	Di Atas Target	Di Bawah Target
1	Kinerja penyelesaian Perkara	6	5	1
2	Kualitas pelayanan pengadilan	1	1	0
3	Kinerja dukungan manajemen	6	2	4
Jumlah		13	8	5

Pada bidang penyelesaian perkara, lima indikator mencatat realisasi sebesar 100 persen. Sementara itu, penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara masih mencatat realisasi 0 persen karena belum terdapat permohonan yang selesai dalam periode waktu pengukuran. Pada bidang kualitas pelayanan, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan menunjukkan hasil yang melampaui target. Adapun pada bidang dukungan manajemen, Indeks Profesionalitas ASN dan IKPA DIPA 005.01 telah melampaui target, sedangkan IKPA DIPA 005.05, NKPA kedua DIPA, serta Indikator Pengelolaan Aset masih memerlukan perhatian.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa capaian kinerja satuan kerja secara umum menunjukkan perkembangan positif pada sejumlah indikator. Namun, tingginya capaian sebagian indikator tidak menghilangkan kewajiban untuk menelaah indikator lainnya yang masih rendah atau belum mencapai tahap penilaian akhir.

C. Pemantauan Indikator Kinerja Utama Pengadian

Tabel menyajikan target 2026, realisasi yang digunakan dalam monitoring Oktober 2026, persentase capaian, dan sumber data. Keterangan “belum diperoleh” berarti nilai masih harus ditarik dari sumber data yang disebutkan sebelum laporan bulan berikutnya ditetapkan.

Kode	Indikator	Target 2026	Realisasi Oktober	Capaian (%)	Sumber Data
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	92	100	108,70	Data Capaian Kinerja
1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	93	100	107,53	Data Capaian Kinerja
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu	92	100	108,70	Data Capaian Kinerja
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	97	100	103,09	Data Capaian Kinerja
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	94	0*	0,00*	Data Capaian Kinerja Laporan Jenis Perkara Oktober 2026 (L1–T2) dan register eksekusi pada aplikasi SIMPAN
1.6	Persentase perkara TUN tingkat pertama dan banding yang menggunakan e-Court	93	100	107,53	Data Capaian Kinerja

Kode	Indikator	Target 2026	Realisasi Oktober	Capaian (%)	Sumber Data
2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	87	97,23 Masih menggunakan nilai Triwulan III	111,76	Data Capaian Kinerja SKM dan SPAK
3.1	Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan	78	82,49	105,76	Data Capaian Kinerja SIKEP Mahkamah Agung
3.2	Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 005.01	92	97,44	105,91	Data Capaian Kinerja Monev Kementerian Keuangan
3.3	Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 005.05	91	90,30	99,23	Data Capaian Kinerja Monev Kementerian Keuangan
3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 005.01	88	42,65	48,47	Data Capaian Kinerja Monev Kementerian Keuangan
3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 005.05	88	45,01	51,15	Data Capaian Kinerja Monev Kementerian Keuangan
3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,51	3,362	95,78	Data Capaian Kinerja E-Sadewa/Bagian Umum

Sumber: Matriks Pengumpulan dan Verifikasi Data Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Bulan Oktober 2026 beserta dokumen pendukung masing-masing indikator.

Keterangan:

1. Tingkat capaian dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target tahun 2026.
2. Seluruh 13 IKU berstatus terverifikasi pada matriks Oktober 2026.
3. IKU 1.5: Sampai akhir Oktober 2026, belum ada permohonan eksekusi yang selesai dari 6 permohonan yang tercatat masuk pada 16 Oktober 2026 di aplikasi SIMPAN.

4. Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 97,23 menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2026 sebagai hasil pengukuran terakhir yang tersedia.
5. Nilai NKPA dan IPA merupakan nilai berjalan yang masih dapat berubah sampai dengan berakhirnya periode penilaian tahun 2026. Khusus untuk nilai NKPA bahwa realisasi target capaian output dilaksanakan pada akhir tahun.
6. Realisasi IPA menggunakan angka dasar 3,362 sebagaimana tercatat dalam matriks, dengan tampilan pembulatan dua desimal sebesar 3,36

D. Analisis dan Tindak Lanjut Kinerja

1. Kinerja Penanganan Perkara

Pada bidang penanganan perkara, lima dari enam indikator menunjukkan realisasi sebesar 100 persen. Hasil tersebut mencakup ketepatan waktu penyelesaian perkara, penyediaan atau pengiriman salinan putusan, pengiriman pemberitahuan putusan upaya hukum, pengunggahan putusan ke Direktori Putusan, serta penggunaan e-Court. Capaian ini menunjukkan hasil yang baik dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan perkara. Kendati demikian, konsistensi pencatatan dan ketepatan pelaksanaan tetap harus dipertahankan. Tindaklanjut dilakukan terhadap indikator penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara yang mencatat realisasi 0 persen. Realisasi indikator penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara pada Oktober 2026 sebesar 0 persen. Dari enam permohonan yang tercatat masuk pada 15 Oktober 2026 di aplikasi SIPP, belum ada yang selesai sampai akhir bulan. Tanggal 10 September 2026 merupakan tanggal surat permohonan, sedangkan 15 Oktober 2026 merupakan tanggal register di SIPP.

Dengan mempertimbangkan waktu masuknya permohonan dan tahapan penyelesaian eksekusi, nilai 0 persen tersebut harus dibaca secara proporsional. Tidak adanya permohonan yang selesai pada periode Oktober merupakan fakta hasil pengukuran, tetapi belum dengan sendirinya dapat disimpulkan sebagai kegagalan pelaksanaan tugas.

2. Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan tercatat sebesar 97,23 dari target 87, dengan tingkat capaian 111,76 persen. Nilai tersebut merupakan hasil survei Triwulan III Tahun 2026 yang digunakan sebagai hasil pengukuran terakhir.

Pencapaian ini perlu dipertahankan melalui konsistensi standar pelayanan, penanganan pengaduan, serta tindak lanjut terhadap masukan pengguna layanan. Sementara itu, Indeks Profesionalitas ASN pada Oktober 2026 tercatat sebesar 82,49 dari target 78, atau mencapai 105,76 persen. Dibandingkan September 2026 yang sebesar 82,57, terdapat penurunan sebesar 0,08 poin. Meskipun masih berada di atas target, perkembangan tersebut perlu dicermati melalui pemeriksaan komponen pembentuk indeks dan kemutakhiran data kepegawaian pada sistem yang digunakan.

Dengan demikian, keberhasilan mencapai target tidak boleh menghentikan proses evaluasi. Kualitas pelayanan dan profesionalitas aparatur perlu ditingkatkan serta pembinaan yang berkesinambungan.

3. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 005.01 pada Oktober 2026 tercatat sebesar 97,44 dari target 92, dengan tingkat capaian 105,91 persen. Dibandingkan September 2026 sebesar 97,80, terjadi penurunan 0,36 poin, meskipun nilai tersebut tetap melampaui target tahunan. Pada DIPA 005.05, nilai IKPA meningkat dari 89,51 pada September menjadi 90,30 pada Oktober 2026. Peningkatan sebesar 0,79 poin tersebut menunjukkan perkembangan positif, tetapi nilainya masih berada 0,70 poin di bawah target 91. Perkembangan IKPA pada kedua DIPA perlu diikuti dengan penelaahan terhadap komponen pembentuk nilai, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan pengelolaan anggaran. Pengelola anggaran perlu mengidentifikasi komponen yang masih dapat diperbaiki dan melaksanakan langkah pengendalian sebelum berakhirnya tahun anggaran.

4. Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 005.01 pada Oktober 2026 tercatat sebesar 42,65 dari target 88, sedangkan DIPA 005.05 sebesar 45,01 dari target yang sama. Dibandingkan September 2026, nilai DIPA 005.01 belum mengalami perubahan, sementara DIPA 005.05 meningkat sebesar 2,18 poin. Kedua nilai tersebut merupakan nilai berjalan dan belum menggambarkan hasil penilaian akhir tahun. Berdasarkan hasil penelaahan pada aplikasi terkait, rendahnya nilai antara lain dipengaruhi oleh Capaian Rincian Output (CRO) serta komponen efisiensi

yang belum terbentuk sepenuhnya. Sebagian volume output tahunan masih memiliki jadwal penyelesaian sampai dengan Desember 2026. Oleh karena itu, evaluasi NKPA tidak cukup dilakukan dengan membaca besaran nilai secara tunggal. Perlu dibedakan antara output yang belum jatuh tempo, output yang telah dilaksanakan tetapi belum tercatat secara tepat, dan output yang pelaksanaannya memang mengalami hambatan. Pengelola anggaran bersama unit penanggung jawab output perlu melakukan pemeriksaan berkala terhadap target dan realisasi setiap Rincian Output melalui aplikasi SAKTI, MyIntress, dan sistem pemantauan terkait. Pembaruan data, validasi, serta kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan pencatatan capaian output menjadi bagian penting dari pengendalian kinerja sampai dengan akhir tahun.

5. Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,362 dari target 3,51, dengan tingkat capaian 95,78 persen. Berbeda dengan periode sebelumnya yang belum memiliki nilai tersedia, pada Oktober telah terdapat hasil penilaian berjalan melalui aplikasi E-Sadewa. Mengingat IPA merupakan indikator dengan periode penilaian tahunan, nilai tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan pemenuhan komponen penilaian sampai dengan akhir tahun. Subbagian Umum dan Keuangan bersama pengelola Barang Milik Negara perlu memastikan kebaruan data aset, kelengkapan dokumen pendukung, serta penyelesaian pekerjaan administrasi pengelolaan BMN yang masih tertunda dan berpengaruh terhadap penilaian.

6. Arah Pengendalian dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring Oktober 2026, pengendalian kinerja pada periode berikutnya perlu diarahkan pada tiga kepentingan utama, yaitu mempertahankan indikator yang telah melampaui target, mempercepat penyelesaian pekerjaan pada indikator yang masih membutuhkan perhatian, serta menjamin kesesuaian antara data yang dilaporkan dan kondisi pelaksanaan tugas yang sebenarnya. Panitera dan Sekretaris sesuai bidang kewenangannya perlu mengoordinasikan tindak lanjut bersama unit pemilik indikator, termasuk penetapan langkah perbaikan, penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaiannya. Hasil tindak lanjut selanjutnya menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pimpinan pada

periode pelaporan berikutnya. Dengan demikian, pengukuran capaian kinerja tidak berhenti pada penyajian angka dan pemenuhan kewajiban administratif. Hasil pengukuran harus mampu mendorong perbaikan tata kerja, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil monitoring capaian kinerja bulan Oktober 2026 menunjukkan bahwa 8 dari 13 Indikator Kinerja Utama memiliki nilai capaian di atas target tahunan, sementara 5 indikator lainnya masih memerlukan perhatian dan pengendalian lebih lanjut. Perkembangan penyelesaian permohonan eksekusi, IKPA DIPA 005.05, NKPA kedua DIPA, dan Indikator Pengelolaan Aset perlu terus dipantau dengan memperhatikan periode serta karakteristik penilaiannya.

B. Rekomendasi

Panitera dan Sekretaris sesuai bidang kewenangannya agar melaksanakan pengendalian terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target, menetapkan langkah tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi, dan memastikan setiap perkembangan didukung oleh data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemantauan hendaknya tidak hanya diarahkan pada pencapaian angka, tetapi juga pada pembenahan mekanisme kerja, ketertiban administrasi, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Bulan Oktober 2026 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas serta dasar tindak lanjut pada periode berikutnya.

Palu, 5 November 2026

Ditandantangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,

OKTOVA PRIMASARI

LAMPIRAN

Nomor	Uraian Lampiran
Lampiran 1	Laporan Keadaan dan Keuangan Perkara Oktober 2026
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01 dan DIPA 005.05 Bulan Oktober 2026 LRA OKTOBER 2026 .pdf
Lampiran 3	Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bulan Oktober 2026 Laporan_Realisasi_Form01 Oktober 2026_sign_signed.pdf
Lampiran 4	Dokumen sumber capaian kinerja dan rekap pembentuk indikator dapat diakses dalam link: Monev Penilaian Kinerja IKU PTUN Palu 2026